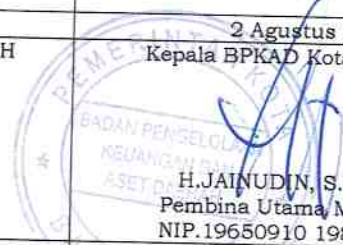




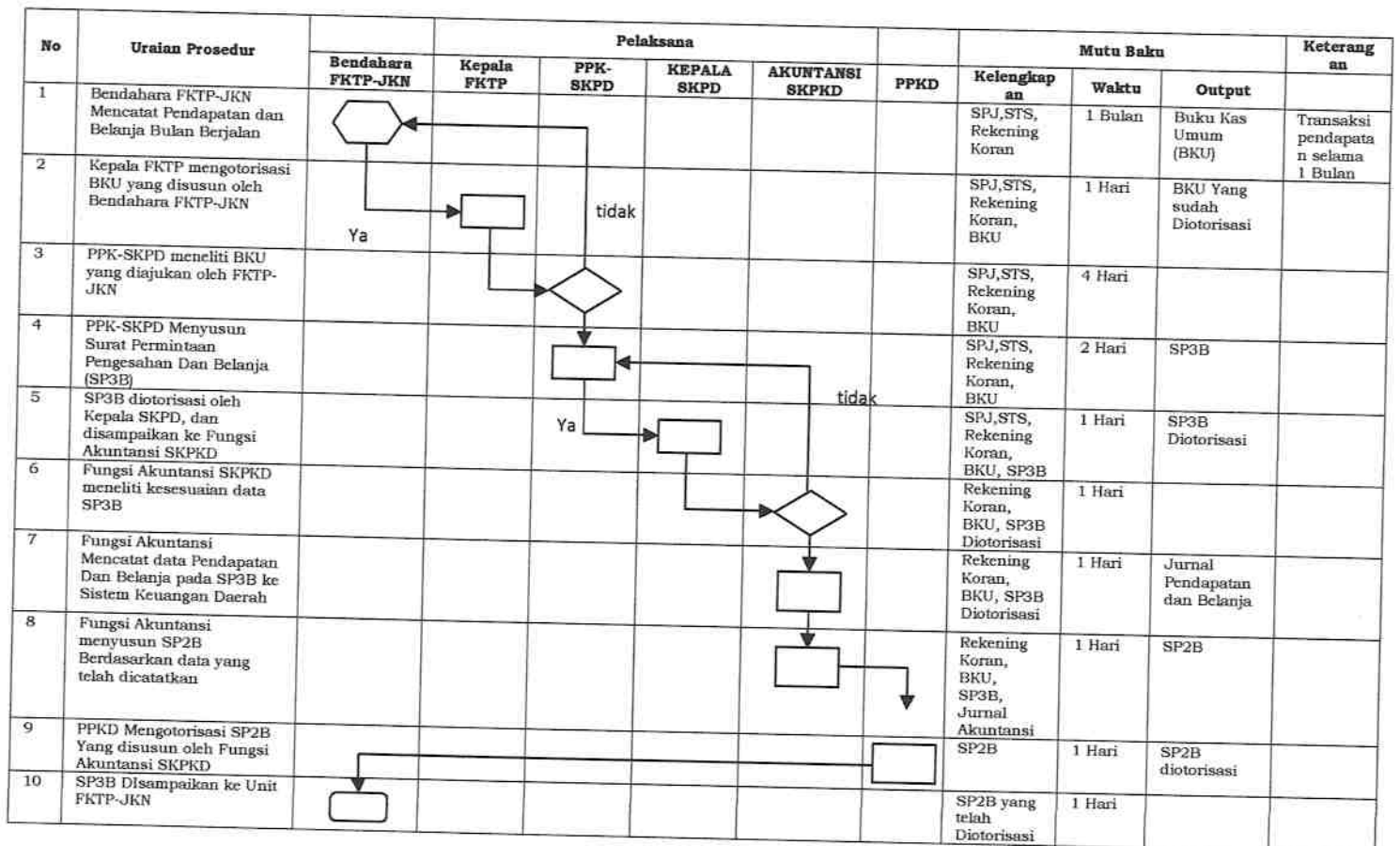
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP	090/015-SOP/2018
TGL PEMBUATAN	2 Agustus 2018
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	2 Agustus 2018
DISAHKAN OLEH	Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
NAMA SOP	SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA NON REKENING KAS UMUM DAERAH PADA FKTP-JKN






H. JAINUDIN, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650910 198602 1 008




DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	1.	Mengerti Konsep Pelaporan Keuangan
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2.	Mengerti Konsep Pengelolaan Kas
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah	3.	Mengerti mengenai klasifikasi belanja
4.	Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru	4.	Dapat mengoperasikan Komputer
5.	Peraturan Walikota Banjarbaru No 82 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pelaporan Pendapatan Dan Belanja Selain Kas Daerah	5.	Dapat Mengoperasikan software
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1. Data SPJ 2. Komputer/Printer 3. Jaringan Internet 4. Rekening Koran	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		1. Berupa Dokumen Fisik 2. Data Elektronik pada Aplikasi Keuangan	



 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p>	NOMOR SOP	040/016-Sop/2018
	TGL PEMBUATAN	2 Agustus 2018
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	2 Agustus 2018
	DISAHKAN OLEH	Kepala BPKAD Kota Banjarbaru H.JAINUDIN, S.Sos, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19650910 198602 1 008
NAMA SOP	SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA NON REKENING KAS UMUM DAERAH PADA BLUD	
DASAR HUKUM		
1.	Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mengerti Konsep Pelaporan Keuangan 2. Mengerti Konsep Pengelolaan Kas 3. Mengerti mengenai klasifikasi belanja 4. Dapat mengoperasikan Komputer 5. Dapat Mengoperasikan software
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah	
4.	Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru	
5.	Peraturan Walikota Banjarbaru No 82 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pelaporan Pendapatan Dan Belanja Selain Kas Daerah	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Data SPJ 2. Komputer/Printer 3. Jaringan Internet 4. Rekening Koran
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		1. Berupa Dokumen Fisik 2. Data Elektronik pada Aplikasi Keuangan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Bendahara BLUD	PPK-BLUD	KEPALA BLUD	AKUNTANSI SKPKD	PPKD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bendahara BLUD Mencatat Pendapatan dan Belanja Bulan Berjalan						SPJ, STS, Rekening Koran	1 Bulan	Buku Kas Umum (BKU)	
3	PPK-BLUD meneliti BKU yang diajukan oleh Bendaharawan						SPJ, STS, Rekening Koran, BKU	3 Hari	BKU Diotorisasi	
4	PPK-BLUD Menyusun Surat Permintaan Pengesahan Dan Belanja (SP3B)						SPJ, STS, Rekening Koran, BKU	2 Hari	SP3B	
5	SP3B diotorisasi oleh Kepala BLUD, dan disampaikan ke Fungsi Akuntansi SKPKD						SPJ, STS, Rekening Koran, BKU, SP3B	1 Hari	SP3B Diotorisasi	
6	Fungsi Akuntansi SKPKD meneliti kesesuaian data SP3B						SPJ, STS, Rekening Koran, BKU, SP3B	1 Hari		
7	Fungsi Akuntansi Mencatat data Pendapatan Dan Belanja pada SP3B ke Sistem Keuangan Daerah						Rekening Koran, BKU, SP3B	1 Hari	Memo Pembukuan Akuntansi	
8	Fungsi Akuntansi menyusun SP2B						Rekening Koran, BKU, SP3B, Memo Pembukuan Akuntansi	1 Hari	SP2B	
9	SP2B Diotorisasi oleh PPKD						Rekening Koran, BKU, SP2B,	1 Hari	SP2B Diotorisasi	
10	SP3B Disampaikan ke Unit BLUD						SP2B	1 Hari		

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p>	NOMOR SOP	040/017-Sop/2018
	TGL PEMBUATAN	2 Agustus 2018
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	2 Agustus 2018
	DISAHKAN OLEH	Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
	NAMA SOP	SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA NON REKENING KAS UMUM DAERAH PADA BLUD
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	1. Mengerti Konsep Pelaporan Keuangan
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Mengerti Konsep Pengelolaan Kas
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah	3. Mengerti mengenai klasifikasi belanja
4.	Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru	4. Dapat mengoperasikan Komputer
5.	Peraturan Walikota Banjarbaru No 82 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pelaporan Pendapatan Dan Belanja Selain Kas Daerah	5. Dapat Mengoperasikan software
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Data SPJ 2. Komputer/Printer 3. Jaringan Internet 4. Rekening Koran
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		1. Berupa Dokumen Fisik 2. Data Elektronik pada Aplikasi Keuangan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Bendahara BLUD	PPK-BLUD	KEPALA BLUD	AKUNTANSI SKPKD	PPKD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bendahara BLUD Mencatat Pendapatan dan Belanja Bulan Berjalan						SPJ, STS, Rekening Koran	1 Bulan	Buku Kas Umum (BKU)	
3	PPK-BLUD meneliti BKU yang diajukan oleh Bendaharawan						SPJ, STS, Rekening Koran, BKU	3 Hari	BKU Diotorisasi	
4	PPK-BLUD Menyusun Surat Permintaan Pengesahan Dan Belanja (SP3B)						SPJ, STS, Rekening Koran, BKU	2 Hari	SP3B	
5	SP3B diotorisasi oleh Kepala BLUD, dan disampaikan ke Fungsi Akuntansi SKPKD						SPJ, STS, Rekening Koran, BKU, SP3B	1 Hari	SP3B Diotorisasi	
6	Fungsi Akuntansi SKPKD meneliti kesesuaian data SP3B						SPJ, STS, Rekening Koran, BKU, SP3B	1 Hari		
7	Fungsi Akuntansi Mencatat data Pendapatan Dan Belanja pada SP3B ke Sistem Keuangan Daerah						Rekening Koran, BKU, SP3B	1 Hari	Memo Pembukuan Akuntansi	
8	Fungsi Akuntansi menyusun SP2B						Rekening Koran, BKU, SP3B, Memo Pembukuan Akuntansi	1 Hari	SP2B	
9	SP2B Diotorisasi oleh PPKD						Rekening Koran, BKU, SP2B,	1 Hari	SP2B Diotorisasi	
10	SP3B Disampaikan ke Unit BLUD						SP2B	1 Hari		